

PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, PENGAWASAN KEUANGAN DESA TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DESA (Studi Kasus di Desa Majenang Sukodono Sragen)

Mayangsari Putri ¹⁾

Suharno ²⁾

Bambang Widarno ³⁾

1, 2, 3) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta
e-mail: ¹⁾ mayangsari16830@gmail.com

ABSTRACT

Purpose for this investigation is to test for transparency effect, accountability and village supervision of finance to performance village's government. This research was conducted at Sukodono Majenang village government with all population was 4085. Types of data used are qualitative data and quantitative data while resource are in use primary data and secondary data. Sampling technique using proportional area random sampling that is as much 94 people. Data collection method was done by using questionnaire and technical analysis using multiple liner regression analysis. The results of the study concluded that: 1) Transparency has a positive and significant effect on the performance of the village government of Sukodono Sragen, 2) Accountability has a positive and significant effect on the performance of the village government of Sukodono Sragen, 3) Supervision of Village Finance has a positive and significant effect on the performance of the village government of Sukodono Sragen.

Keywords: *Transparency, accountability, supervision, performance.*

PENDAHULUAN

Organisasi Pemerintah Daerah adalah sebuah lembaga yang melaksanakan jalannya Pemerintahan yang bersumber hukum dari masyarakat. Oleh sebab itu, harapan yang diberikan dari masyarakat untuk penyelenggara pemerintah harus diselaraskan dengan sistem kinerja yang baik, sehingga pelayanan dapat ditingkatkan secara efektif dan dirasakan oleh masyarakat. Hal ini lebih diperkuat dengan adanya pemberlakuan sistem desentralisasi pada tata Pemerintahan dalam era otonomi daerah.

Kebijakan otonomi daerah pada dasarnya diarahkan untuk mendorong peningkatan kapasitas Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien. Kedekatan organisasi Pemerintah pada *level* desa diharapkan mampu menerima aspirasi riil masyarakat tentang pelayanan apa yang dibutuhkan. Diharapkan ada input yang diperoleh dalam rangka perencanaan pembangunan sehingga tidak ada kesenjangan antara perencanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah baik program dan anggaran dengan kebutuhan riil masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan pelayanan Pemerintah Desa, mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pemerintah Desa. Dalam hal ini mengakibatkan implikasi strategis yaitu situasi desentralisasi politik dan keuangan telah memberikan wewenang yang lebih besar kepada masyarakat desa untuk menentukan arah, kebijakan, tujuan, program hingga aktivitas organisasi Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan.

Proses perencanaan pembangunan desa perlu diimbangi oleh ketersediaan beberapa hal seperti: kapasitas aparatur pemerintah, sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber

dana. Berkaitan dengan hal ini, maka untuk mengukur tingkat pencapaian atas rencana yang ditetapkan dengan sasaran yang ingin dicapai perlu dilakukan evaluasi atas kinerja (Ramanadei, 2009).

Dalam pengelolaan Pemerintah Desa tentunya tidak luput dari penyimpangan-penyimpangan, besarnya alokasi dana ke sejumlah desa membuat potensi penyimpangan anggaran kian terbuka lebar. Penyimpangan itu di antaranya melaporkan kegiatan fiktif, mark up harga dan jumlah barang yang dibeli, penggunaan dan untuk keperluan pribadi, serta tidak adanya pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran. Penelitian ini dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa alasan, antara lain dari penelitian terdahulu sudah mengulas pembahasan yang objeknya di Pemerintah Daerah sedangkan ini penulis mengambil objek yang berbeda yaitu dengan ruang lingkup lebih kecil yang dekat dengan sasaran masyarakat Desa Majenang Sukodono. Di sisi lain berdasarkan observasi peneliti, kinerja Pemerintah Desa Majenang sendiri memang sudah bagus namun dari masyarakat sendiri masih belum terlalu paham akan transparansi dan keakuntabilitasnya dari anggaran dana desa tersebut.

Penelitian ini mengulas mengenai transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Daerah terkait kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa seperti kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dari DPRD dan masyarakat yang digunakan sebagai pengawasan untuk mengetahui apakah kinerja Desa Majenang telah membuahkan capaian sesuai dengan yang diharapkan atau justru kontraproduktif dengan apa yang telah direncanakan.

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

1. Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Pemerintah Desa

Menurut Wiguna, Yuniartha dan Darmawan (2015) dengan hasil bahwa transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa transparansi Pemerintah Daerah terkait dengan pengelolaan keuangan daerah merupakan wujud nyata pemerintah daerah terutama SKPD di Kabupaten Buleleng yang merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam menjelaskan pemerintahan yang bersih, jujur, dan bebas korupsi. Di samping itu transparansi pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah daerah kepada publik merupakan bentuk keberhasilan pemerintah dalam mengelola dana yang ada untuk kepentingan masyarakat dan hal ini adalah bukti bahwa kinerja pemerintah daerah semakin baik.

H₁: Transparansi berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja Pemerintah Desa.

2. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Pemerintah Desa

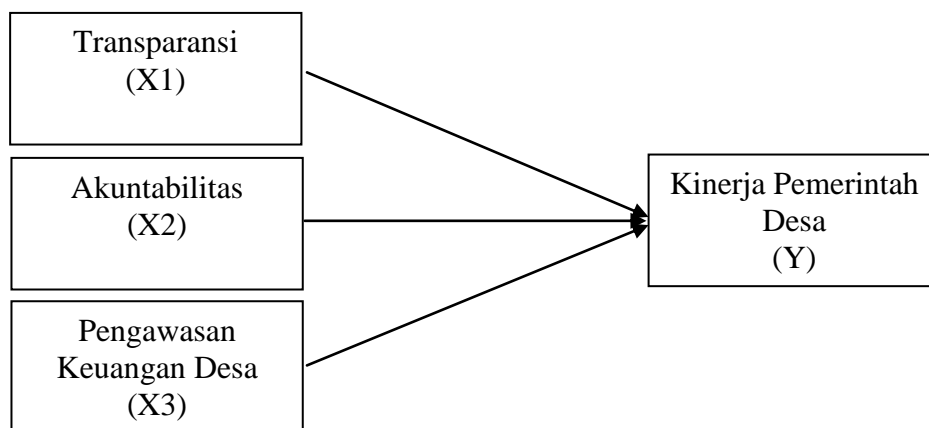
Menurut Natak Riswanto (2016) dengan hasil bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh yang relatif kuat terhadap kinerja Pemerrintah Daerah. Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat yang diajukan oleh Mardiasmo (2006), menyatakan bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan oleh aparatur negara, menimbulkan persepsi aparatur terhadap kinerja layanan publik. Persepsi dari masing-masing aparatur digunakan untuk menilai efektivitas dari kinerja yang dilakukan selama ini. Terlebih lagi tuntutan akuntabilitas membuat para aparatur negara lebih memfokuskan pelayannya terhadap masyarakat. Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga publik baik pusat maupun daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai dasar pelaporan keuangan yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya.

H₂: Akuntabilitas berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja Pemerintah Desa.

3. Pengaruh Pengawasan Keuangan Desa dengan Kinerja Pemerintah Desa
- Menurut Wiguna, Yuniartha dan Darmawan (2015) dengan hasil bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Buleleng sebesar 28,1 % dan hasil pengujian hipotesis dengan t-test didapatkan bahwa t-hitung > t-tabel ($2,572 > 1,694$) sehingga hipotesis diterima. Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Menzeis (dalam Rahayu, 2008), Zubir, Amri dan Saiful (2012) yang menyatakan bahwa kinerja dapat ditingkatkan dengan pengawasan yang baik, pemimpin harus mempunyai sistem pengawasan yang ia perlukan untuk mengarahkan para bawahannya dengan tepat. Kebijakan pengawasan tersebut dalam jangka panjang lebih diarahkan kepada tindakan pencegahan, perbaikan sistem dan manajemen pembangunan, sedangkan dalam jangka pendek lebih diarahkan kepada pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan seluruh penyebab timbulnya inefisiensi.
- H₃: Pengawasan Keuangan Desa berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja Pemerintah Desa.

Kerangka Pemikiran

Untuk menunjukkan suatu arah dari penyusunan skripsi agar dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran

Dari kerangka pemikiran yang telah dikemukakan, memiliki makna bahwa ada 3 variabel independen yaitu independen transparansi, akuntabilitas dan pengawasan keuangan yang berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu kinerja Pemerintah Desa.

METODE PENELITIAN

Rancangan penelitian ini merupakan studi kasus di Pemerintahan Desa Majenang Sukodono Sragen Provinsi Jawa Tengah. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif sedangkan sumber data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan kuesioner.

Populasi dalam penelitian ini adalah semua masyarakat desa Majenang Sukodono Sragen yang sudah mempunyai hak untuk memilih dengan jumlah 4.085 orang (sumber bagian administrasi kepegawaian, 2018). Teknik pengambilan sampel menggunakan *proportional area random sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang memperhatikan pertimbangan kategori atau unsur-unsur dalam penelitian yang memiliki ciri-ciri populasi pada penelitian ini yang tiap

dusun berbeda jumlah masyarakatnya, sehingga jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 94 orang.

Instrumen pengujian dalam penelitian ini menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Kemudian metode analisis data pertama yang digunakan adalah uji asumsi klasik yang terdiri dari uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas. Kemudian data dianalisis dengan menggunakan analisis linear berganda, analisis determinasi, uji t, dan uji F.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Hasil pengumpulan data di lapangan dengan menggunakan metode kuesioner dari transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan keuangan desa terhadap kinerja pemerintah desa Majenang Sukodono Sragen maka diperoleh analisis deskriptif sebagai berikut: sampel yang digunakan adalah 94 responden dengan nilai Mean atau rata-rata dari variabel transparansi sebesar 23,82, variabel akuntabilitas sebesar 23,91, variabel pengawasan keuangan desa sebesar 22,14, variabel kinerja pemerintah desa sebesar 15,95. Nilai data yang menunjukkan tingkat derajat variasi masing-masing variabel dapat dilihat pada nilai standar deviasi yaitu variabel transparansi sebesar 3,586, variabel akuntabilitas sebesar 3,879, variabel pengawasan keuangan desa sebesar 3,478, dan kinerja pemerintah desa sebesar 2,967.

Uji Asumsi Klasik

Untuk dapat mengetahui apakah regresi linear berganda dalam penelitian ini memang benar menunjukkan hubungan yang signifikan dan representatif maka harus dilakukan dengan uji asumsi klasik dengan hasil seperti tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik	Hasil Uji	Kesimpulan
Uji multikolinearitas	<i>Tolerance</i> (0,148; 0,156; 0,825) > 0,10 VIF (6,740; 6,431; 1,213) < 10	Tidak ada multikolinearitas
Uji autokorelasi	P (0,409) > 0,05	Tidak ada autokorelasi
Uji heteroskedastisitas	P (0,802; 0,391; 0,475) > 0,05	Tidak ada heteroskedastisitas
Uji normalitas	P (0,456) > 0,05	Residual terdistribusi normal

Sumber: Hasil olah data, 2018.

- 1) Uji multikolinearitas
 - a. Transparansi memiliki nilai *tolerance* = 0,148 > 0,1 dan nilai VIF = 6,740 < 10, sehingga tidak terjadi multikolinearitas.
 - b. Akuntabilitas memiliki nilai *tolerance* = 0,156 > 0,1 dan nilai VIF = 6,431 < 10, sehingga tidak terjadi multikolinearitas.
 - c. Pengawasan Keuangan Desa memiliki nilai *tolerance* = 0,825 > 0,1 dan nilai VIF = 1,213 < 10, sehingga tidak terjadi multikolinearitas.
- 2) Uji autokorelasi

Hasil uji autokorelasi dapat diketahui bahwa *p value* 0,409 > 0,05, maka tidak terjadi autokorelasi.
- 3) Uji heteroskedastisitas
 - a. Transparansi diperoleh *p value* 0,802 > 0,05 sehingga bebas heteroskedastisitas.

- b. Akuntabilitas diperoleh p value $0,391 > 0,05$, sehingga bebas heteroskedastisitas.
 - c. Pengawasan Keuangan Desa diperoleh p value $0,475 > 0,05$, sehingga bebas heteroskedastisitas.
- 4) Uji normalitas
 Hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* dapat dijelaskan, bahwa secara keseluruhan variabel yang digunakan dalam penelitian ini yang dinyatakan terdistribusikan secara normal, karena p value $0,456 > 0,05$.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas yaitu transparansi (X1), akuntabilitas (X2), dan pengawasan keuangan desa (X3) terhadap variabel terikat yaitu kinerja pemerintah desa (Y) pada pemerintahan desa Majenang Sukodono Sragen. Dari hasil analisis data dapat disajikan dalam tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Liner Berganda

Model	Unstandardized Coefficients	t	Sig.
	B		
(Constant)	-2,711	-2,511	0,014
Trans	0,420	4,188	0,000
Akun	0,270	2,989	0,004
PKeu	0,099	2,268	0,026
Adjust R Square = 0,789			
F-Hitung = 123,259			
Sig. F = 0,000 ^b			

Sumber: Hasil olah data, 2018.

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda diperoleh persamaan garis regresinya sebagai berikut:

$$Y = -2,711 + 0,420X_1 + 0,270X_2 + 0,099X_3$$

Interpretasi dari hasil persamaan regresi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta (a), yaitu -2,711, artinya apabila transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan keuangan desa adalah nol atau tidak ada maka kinerja pemerintah desa akan menurun sebesar -2,711.
- b. Nilai koefisien regresi untuk variabel transparansi (X₁), yaitu 0,420. Hal ini berarti bahwa dengan transparansi yang semakin baik maka kinerja pemerintah desa juga semakin meningkat, di mana variabel akuntabilitas diasumsikan tetap.
- c. Nilai koefisien regresi untuk variabel akuntabilitas (X₂), yaitu sebesar 0,270. Hal ini berarti dengan akuntabilitas yang semakin baik maka kinerja pemerintah desa juga semakin meningkat, di mana variabel pengawasan keuangan desa diasumsikan tetap.
- d. Nilai koefisien regresi untuk variabel pengawasan keuangan desa (X₃), yaitu sebesar 0,099. Hal ini berarti dengan pengawasan keuangan desa yang semakin baik maka dapat meningkatkan kinerja pemerintah desa, di mana variabel transparansi diasumsikan tetap.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh transparansi terhadap kinerja pemerintah desa

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini menjelaskan bahwa variabel transparansi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap variabel kinerja pemerintah desa yang dapat dilihat dari nilai t sebesar 4,188, dan menandakan bahwa nilai t tersebut lebih besar dari persamaan nilai signifikan yaitu sebesar 0,05. Maka nilai signifikansi dari variabel transparansi adalah $0,000 < 0,05$. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel transparansi berpengaruh secara positif signifikan terhadap variabel kinerja pemerintah desa. Berdasarkan hipotesis dalam penelitian ini maka hipotesis H_1 diterima dan hipotesis H_0 ditolak, penyebab dari variabel transparansi dapat berpengaruh terhadap variabel kinerja pemerintah desa dikarenakan variabel transparansi melalui pemerintah desa mengungkapkan tentang informasi keuangan dan non-keuangan kepada masyarakat melalui media secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diakses oleh pihak-pihak berkepentingan sesuai dengan haknya. Melalui transparansi dapat menyediakan informasi yang memadai tentang penyusunan rencana kerja dan informasi laporan keuangan desa yang diberikan secara tepat waktu dan handal mengenai transparansi atau keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi tentang aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut.

2. Pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah desa

Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini menjelaskan bahwa akuntansi memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah desa. Hal tersebut dapat dilihat pada nilai 2,989 yang menandakan nilai t tersebut lebih besar dari persamaan nilai signifikansi yaitu 0,05. Maka nilai dari signifikansi akuntabilitas adalah $0,004 > 0,05$. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah desa. Berdasarkan hipotesis dalam penelitian ini maka hipotesis H_0 ditolak dan H_a diterima, dengan demikian penyebab akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa adalah karena pemerintah berhasil menjalankan misi dan visi dalam mencapai tujuan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya secara periodik. Kinerja pemerintah dapat dikatakan baik apabila setiap perencanaan yang telah direncanakan oleh pemerintah untuk mencapai hasil yang maksimal dari perencanaan tersebut salah satunya adalah pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa telah dilakukan dengan benar untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Dalam penelitian pemerintah telah melakukannya dengan baik dan benar, dari perencanaan awalnya sudah sama dengan pencapaian hasil akhir karena ada program yang telah berjalan dengan baik dan benar.

3. Pengaruh pengawasan keuangan desa terhadap kinerja pemerintah desa

Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pengawasan keuangan desa mempunyai pengaruh terhadap kinerja pemerintah desa dan dapat dilihat pada nilai t 2,268 lebih besar dari persamaan nilai signifikan yaitu 0,05. Sedangkan nilai signifikansi dari pengawasan keuangan desa $0,026 < 0,05$, maka dari itu pengawasan keuangan desa berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah desa. Berdasarkan hipotesis dalam penelitian ini maka dapat dijelaskan H_a diterima dan H_0 ditolak, dengan demikian penyebab dari pengawasan keuangan desa berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa adalah pengawasan keuangan desa telah menjelaskan tentang hasil yang dicapai dalam setiap kegiatan keuangan. Pemerintah mempunyai pedoman dan prosedur kerja menyeluruh jenjang organisasi yang sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah telah bertindak sebagai pemerintahan yang baik dan benar termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial. Pengawasan keuangan desa dapat diartikan suatu rangkaian dari kegiatan pemantauan, pemeriksaan, dan

evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang melibatkan anggaran dana desa. Pengawasan keuangan desa dapat dilakukan oleh pengawasan intern dan pengawasan ekstern. Berdasarkan undang-undang yang ditetapkan pelaksanaan pengawasan keuangan desa berpedoman pada standar pengawasan. Dalam pelaksanaan pengawasan keuangan desa dapat dilakukan dengan pemeriksaan, namun tidak setiap kegiatan pengawasan harus dilakukan melalui pemeriksaan. Pengawasan keuangan ini dapat dilakukan oleh pemerintah pusat dan juga masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa dari Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Pengawasan Keuangan Desa terhadap Kinerja Pemerintah Desa, maka dapat disimpulkan bahwa: Variabel transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah desa yang artinya bahwa tingginya keterbukaan informasi pada masyarakat desa Majenang Sukodono Sragen dapat memberikan peningkatan kinerja pemerintah desa Majenang Sukodono Sragen tersebut. Variabel akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah desa yang artinya bahwa semakin tinggi pertanggungjawaban program kerja pada masyarakat desa Majenang Sukodono Sragen dapat memberikan peningkatan kinerja pemerintah desa Majenang Sukodono Sragen tersebut. Variabel pengawasan keuangan desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah desa yang artinya bahwa tingginya pengawasan keuangan desa dari masyarakat desa Majenang Sukodono Sragen dapat memberikan peningkatan kinerja pemerintah desa Majenang Sukodono Sragen.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifiant, Hermin, Payamta, Sutaryo. 2013. "Pengaruh Pemeriksaan dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia)". *Simposium Nasional Akuntansi XVI*. Universitas Sebelas Maret.
- Made Budi Sastra Wiguna, Gede Adi Yuniartha, Nyoman Ari Surya Dermawan. 2015. "Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi engelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng". *Jurnal Akuntansi*. Vol. 3, No. 1. Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia.
- Putra, Nopriyansah, Erlina, dan Tapi Anda Sari. 2016. "Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparasi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dengan Pengawasan Sebagai Variabel Moderating pada Provinsi Sumatera Utara". *Jurnal Ekonomi*. Vol. 19.No. 4.Oktober.FEB USU. Indonesia.
- Ramandei, Pilipus. 2009. "Pengaruh Karakteristik Sasaran Anggaran dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kinerja Manajerial Aparat Pemerintah Daerah". *Tesis*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang
- Riswanto, Natak. 2016. "Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember". *Jurnal Akuntansi*. Universitas Jember. Jember.
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2004 tentang Pemerintah Desa.